



Membaca “Paradigma” Pendidikan dalam Bingkai Multikulturalisme

Aris Saefulloh *)

*) Penulis adalah dosen tetap IAIN Sultan Amai Gorontalo Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.

Abstract: Indonesia have acquainted with multiculturalism from a long time ago, explicit from Kitab Sutasoma by Empu Tantular. From this book, Indonesia adopts jargon Bhineka Tunggal Ika to provide a place for diversity that very complex. However, this complex diversity if didn't managed carefully will trigger division through primordial conflict. This article will suggest importance of education that endorse multiculturalism as understanding to diversity—that actually have one direction. This article is important if we look at recent times where do many ethnic conflicts like at Poso, Kupang, Sampit, Sambas, and several regions. If its let prolonged, those conflict can deprave solidarity spirit of Indonesian nation. **Keywords:** *Multiculturalism, Indonesia, education.*

Pendahuluan

Indonesia—negara yang memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945—memang memiliki keanekaragaman yang amat kompleks. Mulai dari ras dan suku yang beragam dan tersebar dalam beribu-ribu pulau yang ada, agama yang beragam, baik itu agama global (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu) hingga agama-agama lokal, semisal Kejawen di Jawa. Bahasa, lingkungan, adat, kebiasaan, hingga makanan yang sangat bervariasi dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidaklah salah bila Indonesia disebut sebagai negara multi-budaya, multi-etnis, dan multi-agama.

Sesungguhnya, keragaman yang dimiliki oleh Indonesia tersebut bila dikelola secara benar akan menghasilkan kekuatan positif bagi pembangunan bangsa. Namun, bila tidak dimanfaatkan dan dikelola secara benar, maka kemajemukan bisa menjadi faktor destruktif dan dapat menimbulkan bencana yang dahsyat.¹ Pertikaian di Ambon, Kupang, Sampit, Sambas, Poso, Maluku, dan beberapa tempat lainnya² adalah contoh dari realitas konflik yang disebabkan karena perbedaan dalam masyarakat tersebut. Konflik tersebut terus terjadi hampir secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi bagian dari kemajemukan dan multibudaya yang tidak dikelola dengan baik. Sifat realitas kekerasan dan konflik sosial di Indonesia yang aktual sekaligus menyejarah telah membenarkan anggapan bahwa kekerasan hampir menjadi setelan mental (*mind-set*) kolektif, maupun individual bangsa Indonesia.³

Bagi negara atau daerah yang memiliki multibudaya seperti Indonesia, konflik dan kekerasan sosial tersebut menjadi permasalahan yang cukup penting. Kondisi di Indonesia menjadi cukup memprihatinkan karena konflik dan kekerasan sosial tersebut terus berkembang mengiringi perjalanan dan perkembangan sejarah Indonesia. Upaya meredam konflik memang telah dilakukan, namun tetap saja masih terjadi. Jargon *Bhinneka Tunggal Ika*, adalah upaya memahami dan menghargai perbedaan yang ada yang dimiliki oleh setiap daerah, namun tetap satu dalam bingkai negara Indonesia.



Keragaman budaya yang merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal dalam masyarakat Indonesia itu, sesungguhnya telah dipahami dan muncul sejak negara ini terbentuk dengan adanya upaya untuk “mendesain” kebudayaan nasional. Ciri khas dan karakteristik budaya, adat, bahasa, dan kebiasaan yang dimiliki masing-masing daerah diberi kesempatan untuk berkembang dan menjadi aset yang dimiliki oleh bangsa, artinya setiap perbedaan yang ada akan dinilai sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan bangsa.

Konsep inilah yang sesungguhnya sekarang kita kenal dengan konsep multikulturalisme. Multikulturalisme bukan hanya sekadar memiliki perbedaan saja (pluralitas), namun keragaman yang ada diberi kesempatan, bahkan kebebasan untuk mengembangkan diri dengan tetap saling menghargai. Pluralitas yang ada akan dilihat sebagai perbedaan yang harus dihargai dan dihormati, walaupun mereka memiliki identitas budaya dan identitas sosial sendiri. Keberagaman budaya tersebut menjadi tempat pembelajaran bagi setiap individu dari berbagai budaya yang berbeda, yang akan melahirkan tingkah laku sosial, menyepakati norma dan nilai-nilai bersama, dan membangun struktur kelembagaan. Oleh karena itu, dalam masyarakat multikultural selalu terjadi interaksi yang dinamis di antara individu-individu. Hal itu merupakan proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju ke arah kebaruan budaya. Pluralitas dalam masyarakat multikultural mempersyaratkan adanya kemerdekaan dan keadilan. Ketertundukan semua warga negara pada hukum di sini seyogyanya tidak diartikan sebagai peniadaan kemerdekaan, namun untuk tetap memberikan jaminan pada terciptanya kemerdekaan itu sendiri.

Diktum Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia sesungguhnya dapat dijadikan landasan “ideologis” dan “filosofis” mengembangkan kehidupan multikultural di negeri ini. Namun, amat disayangkan karena selama ini semboyan hanya berhenti pada kesadaran kognitif masyarakat kebanyakan dan menjadi jargon *lip service* penguasa belaka, tidak diimplementasikan secara nyata dan tepat dalam kehidupan sosial masyarakat kita sehingga multikulturalisme yang harmonis masih menjadi sebuah angan-angan.

Bila dirunut, maka Orde Baru turut andil dalam memandulkan makna Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Hal itu terjadi karena kesadaran tetap “satu jua” dikemas atas nama persatuan dan stabilitas negara yang kemudian melahirkan paham *mono*-kulturalisme dengan cenderung “memaksakan” pola dengan karakteristik penyeragaman dalam berbagai aspek: sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bahkan, dalam agama pun dibatasi pada agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Bukan hanya itu, agama yang sudah diakui pun tidak dapat leluasa dalam beraktivitas. Seseorang yang akan berceramah harus pula mengantongi SIM (Surat Ijin Mubaligh) dari pemerintah.

Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan konsep bagus telah mengalami penyelewengan makna dan bias interpretasi dengan mengambil pendekatan dan strategi yang keliru dalam mengelola relasi sosial-budaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Keanekaragaman budaya dari berbagai komunitas masyarakat tidak mendapat pemenuhan secara adil.



Dengan dalih stabilitas nasional, maka banyak budaya masyarakat yang dikerdilkan, bahkan tidak jarang yang harus merepresi jati diri (*selfhood*) untuk dapat diakui dan melebur pada apa yang dikenal sebagai “kebudayaan nasional”. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilakukan berpusat dari atas ke bawah (sentralistik) menjadikan wawasan multikulturalisme lenyap dan didominasi oleh monokulturalisme.⁴ Setiap tindakan yang mengarah pada perbedaan pendapat atau gugatan kepada kebijakan pemerintah dianggap sebagai tindakan subversif yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sikap politik yang tanpa kompromi itu kemudian telah melahirkan drama tersendiri bagi keberadaan kebudayaan di Indonesia yang sangat beragam tersebar di seluruh Nusantara. Kebudayaan di berbagai tempat tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk diekspresikan sehingga melahirkan berbagai akibat yang saat ini sedang dialami bersama: gerakan pemisahan diri dari pusat, konflik sosial yang meluas, kredibilitas negara yang rendah, dan teror. Bhinneka Tunggal Ika dibutuhkan untuk mengikat pluralisme budaya Indonesia, namun kesalahan pengelolaan keragaman budaya ini telah melahirkan akibat-akibat yang buruk.⁵

Penyeragaman kebudayaan-kebudayaan suku bangsa di daerah-daerah telah dilakukan antara lain dengan menyudutkan kebudayaan-kebudayaan tersebut terbelakang dan harus di-Indonesia-kan. Peng-Indonesia-an dilakukan dengan cara penataran P4...⁶

Penanaman wawasan multikulturalisme dapat diawali dengan kesadaran pentingnya nilai kebersamaan, menanamkan sikap toleransi, serta menjunjung tinggi demokrasi dan pemahaman makna budaya perdamaian (*cultural of peace*). Dalam definisi UNESCO, budaya perdamaian tampil dalam makna yang merangkum konsep-konsep kebebasan, keadilan, demokrasi, tenggang rasa, solidaritas, nirkekerasan, negoisasi, hak-hak asasi manusia, dan pemberdayaan kaum lemah. Dalam *The UN Millenium Declaration*⁷ disebutkan enam nilai mendasar untuk menghadapi tantangan abad 21, yakni kemerdekaan, persamaan, solidaritas, tenggang rasa, sikap hormat pada alam, dan tanggung jawab bersama.⁸

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang kompleks, multikulturalisme dapat tumbuh dengan diawali mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan multikulturalisme. Sikap anti-multikulturalisme (pro-kekerasan, chauvinisme yang kuat) memang tidaklah dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun dengan memperkuat penanaman sikap multikulturalisme dalam masyarakat akan dapat memperkecil benih-benih perpecahan dan konflik sosial. Dalam hal ini, mengubah *mind-set*—baik secara individu maupun kolektif—bukanlah pekerjaan yang mudah.

Di sinilah pendidikan menjadi sangat penting karena dengan pendidikan kesadaran akan nilai multikultur tersebut dapat dikembangkan. Terlebih di Indonesia, pendidikan (formal) yang berkembang adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan. Melalui lembaga-lembaga pendidikan itulah mutu, kepandaian, keterampilan dan pengetahuan seseorang diciptakan. Melalui lembaga pendidikan tersebut, doktrin-doktrin dan penanaman “pengetahuan” dilahirkan. Karenanya, kesadaran multikulturalisme akan dapat tercipta dengan baik manakala ditanamkan sejak awal melalui jalur pendidikan. Pendidikan dengan basis kultural akan sangat membantu seseorang untuk mengerti, memahami serta menerima



perbedaan sebagai sebuah keniscayaan yang harus dihargai dan dihormati sehingga akan tumbuh pemahaman akan relativitas nilai budaya (dan agama).

Pendidikan Islam Indonesia: Hakikat Vs Realita

Dari sisi *etimology*, pendidikan berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*” yang berarti “bimbingan” yang diberikan kepada anak-anak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “*education*” yang berarti “pengembangan” atau “bimbingan”.⁹ Secara *terminology* pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁰ M.J. Langeveld sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono mengartikan pendidikan sebagai kegiatan membimbing anak manusia menuju kepada kedewasaan dan kemandirian.¹¹ Dalam perspektif multikulturalisme, maka pendewasaan dan kemandirian tersebut diarahkan pada pemahaman akan relativitas nilai budaya yang berkembang serta penanaman toleransi yang menjunjung tinggi perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat mencapai harapan tersebut, maka menurut Hasan Langgulung ada tiga sudut pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dari sudut pandangan masyarakat, dari segi pandangan individu, dan yang ketiga adalah pendekatan sebagai wujud interaksi antara potensi dan budaya.

Dari sisi pendekatan pandangan masyarakat, pendidikan berarti warisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar kehidupan masyarakat dapat berkelanjutan. Dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari satu generasi ke generasi berikutnya agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara.¹² Pewarisan nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan kepada generasi-generasi penerusnya ini merupakan identitas dan ciri khas tertentu dari sesuatu yang dimiliki masyarakat tersebut; dapat berupa nilai-nilai seni, keterampilan, keahlian, keagamaan, atau lainnya yang meliputi seluruh dinamika kehidupan.

.... nilai-nilai ini bermacam-macam. Ada yang bersifat intelektual, seni, politik, ekonomi dan lain-lain lagi. Dalam berbagai hal, nilai-nilai budaya ini berpadu dalam suatu karya seperti pada binaan rumah. Setiap masyarakat akan berusaha mewariskan keahlian dan keterampilan yang dipunyainya itu kepada generasi mudanya agar masyarakat tersebut tetap memelihara kepribadiannya yang berarti memelihara kelanjutan hidup masyarakat tersebut.¹³

Dilihat dari kacamata individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi fisik maupun psikis yang dimiliki agar dapat teraktualisasikan secara maksimal sesuai dengan tugas perkembangannya. Dalam hal ini, anak didik merupakan manusia yang dibekali seluruh potensi kemanusiaan, yang secara praktis dapat ditumbuhkembangkan agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat.

... manusia di atas dunia ini mempunyai sejumlah atau seberkas kemampuan (*abilities*) yang sifatnya umum pada setiap manusia, sama umumnya dengan kemampuan melihat dan mendengar tetapi berbeda dalam derajat menurut masing-masing orang seperti halnya dengan panca indera juga. Ada orang yang penglihatannya kuat, pendengarannya lemah dan lain-lain seterusnya.¹⁴



Pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak tampak. Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan digali supaya dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusia mempunyai berbagai bakat dan kemampuan yang kalau pandai kita mempergunakannya bisa berubah menjadi emas dan intan, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah.¹⁵

Dengan demikian, pendidikan dalam pandangan individu merupakan pengembangan potensi dan kreativitas, yang menggarap kekayaan yang ada dalam individu agar dapat dinikmati oleh dirinya dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Suatu kemakmuran masyarakat tergantung pada kesanggupan masyarakat tersebut dalam menggarap potensi yang ada dalam setiap individunya.¹⁶

Pendidikan juga dapat dipandang sebagai proses transformasi pengetahuan yang bersifat *take and give*, artinya pendidikan dipandang sebagai suatu transaksi, yaitu proses memberi dan menerima, antara manusia dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan proses di mana harus manusia mampu mengembangkan dan menciptakan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengubah dan memperbaiki kondisi-kondisi kemanusiaan dan lingkungannya, begitu juga dengan pembentukan sikap yang membimbing usaha dalam membina kembali sifat-sifat kemanusiaan dan jasmaniahnya. Pendekatan dalam pandangan pendidikan ini merupakan interaksi antara potensi dan budaya, di mana proses tersebut berjalan bersama-sama, saling mengisi satu dengan lainnya.¹⁷ Dengan demikian, pandangan tentang pendidikan ketiga ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, yang mungkin terjadi adalah salah satunya mendapat penekanan (*emphasis*) lebih banyak dibandingkan dengan yang lain.

Dengan memahami tiga pendekatan *ala* Langgulung tersebut, maka multikulturalisme memiliki ruang untuk berkembang, baik dari sudut pandang individu, sudut pandang masyarakat, maupun interaksi antara potensi dan budaya semuanya memberikan celah berkembangnya arah pendidikan dengan tetap bercermin pada nilai dan budaya yang sudah ada. Pendidikan tidak hanya sekadar *transfer of value*, namun juga aktualisasi dari nilai-nilai serta potensi agar dapat berkembang dengan baik dalam masyarakat.

Sayangnya, konsep bagus tersebut belum terwujud dengan baik dalam kehidupan pendidikan di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa Indonesia masih cenderung menggunakan sistem “monokultural”; sentralistik yang berasal dari pusat. Hal itu sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa sistem pendidikan Indonesia belum berpegang pada landasan yang kuat, maka kecenderungan berubahnya sistem dan pola sangat kuat tatkala terjadinya pergantian Menteri Pendidikan yang baru. Yang ditakutkan adalah perubahan sistem tersebut sangat mempengaruhi lembaga pendidikan yang dibebani oleh aturan administratif yang rumit. Lihat saja sekarang, seorang guru sangat disibukkan dengan laporan administrasi seperti SAP, porto folio, dan sejenisnya yang cukup menyita waktu. Oleh karena itu, seorang guru kini cenderung lebih berkonsentrasi pada pembuatan porto folio dibandingkan membuat bahan pelajaran yang akan disampaikan. Tidak heran apabila materi-materi yang disampaikan juga menjadi terabaikan. Padahal, muatan materi yang tepat akan menentukan kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Walaupun saat ini terdapat materi muatan lokal (khususnya pada pendidikan dasar dan



menengah), namun dirasakan belum mampu mengubah iklim pendidikan pada cuaca yang menggembirakan.

Nasib yang lebih memprihatinkan adalah pendidikan agama. Memang, Pendidikan Agama (Islam) sejak tahun 1967 ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib, namun hanya dalam 2 jam pelajaran. Durasi yang hanya 2 jam pelajaran, dirasa sangatlah jauh dari ideal dalam membangun karakteristik keagamaan yang kokoh. Hal ini berimbas pada dangkalnya pemahaman anak-anak Indonesia, terutama yang bersekolah di sekolah umum. Dalam kaca mata multikulturalisme, pendidikan agama yang disampaikan di sekolah-sekolah pada umumnya tidak mampu menghidupkan semangat multikulturalisme yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Pendidikan agama masih diajarkan dengan menafikan hak hidup agama lain, yang artinya menganggap bahwa agama sendirilah yang paling benar, yang berhak untuk hidup dan berkembang. Sementara itu, agama yang lain tidak memiliki hak hidup, sesat dan “haram” untuk berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini semakin memperparah terwujudnya multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemahaman keagamaan semacam ini sering dipakai untuk mempertegas atau melegitimasi konflik sosial yang terjadi. Aksi terorisme (yang berbentuk pengeboman di sejumlah wilayah di Indonesia) adalah contoh dalam hal ini.

Demikian pula pada masyarakat Islam saat ini, yang digandrungi dengan formalisasi identitas keagamaan dengan bentuk “Arabisasi”. Mereka memilih untuk menggunakan kata *ahad* dibandingkan minggu dirasa lebih terasa Islamnya. Seolah-olah kalau tidak menggunakan kata-kata berbahasa Arab tersebut menjadi “tidak Islami” atau keislamannya berkurang karenanya.¹⁸

...kaum muslimin di Indonesia, sekarang justru sedang asyik bagaimana mewujudkan berbagai keagamaan mereka dengan bentuk dan nama yang diambilkan dari Bahasa Arab. Formalisasi ini, tidak lain adalah kompensasi dari rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan bertahan dalam menghadapi “kemajuan Barat”. Seolah-olah Islam akan kalah dari peradaban Barat yang sekuler, jika tidak digunakan kata-kata berbahasa Arab. ... mereka tidak pernah mempelajari agama dan ajaran Islam dengan mendalam. Langsung kembali ke “akar” Islam, yaitu kitab suci Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, dengan demikian penafsiran mereka atas kedua sumber tertulis agama Islam yang disebut dengan *dalil naqli*, menjadi *superficial* dan “sangat keras” sekali. Bukankah ini sumber dari terorisme yang kita tolak yang menggunakan nama Islam?¹⁹

Konsep Multikulturalisme: Titik Temu Pluralitas Menuju Kajian Ruang Budaya

Setidaknya ada tiga istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan keanekaragaman atau keberagaman yang terjadi dalam masyarakat, yaitu: keragaman (*diversity*), pluralitas (*plurality*), dan multikultur (*multicultural*). Ketiganya memang menunjukkan adanya ketidaktunggalan (lebih dari satu dan [mungkin] banyak), namun masing-masing merepresentasikan hal yang berbeda. *Diversity* menunjukkan keadaan yang heterogen, di mana satu dengan yang lainnya tidak dapat disamakan.

Plurality dalam praktiknya menunjukkan hal-hal yang lebih dari satu. Masyarakat plural adalah masyarakat yang memiliki dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tidak menyatu dan bercampur dalam satu unit politik tertentu yang tunggal.²⁰ Konsep yang dike-



mukakan Furnivall ini didasarkan atas realitas kehidupan sosial politik Eropa pada waktu itu yang relatif homogen, namun penuh dengan kefanatikan suku yang kuat, agama, serta gender.

Sementara itu, multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang dibidang baru dalam dunia pengetahuan. Konsep dasar dari multikulturalisme adalah menerima dengan lapang dada kelompok atau golongan lain sebagai satu kesatuan, walaupun memiliki perbedaan budaya, ras, suku, etnik, gender, adat, bahasa, dan agama.

Bila dilihat secara sederhana multikulturalisme dapat diartikan sebagai “keberagaman budaya”.²¹ Konsep multikulturalisme memberikan pengakuan dan penegasan bahwa perbedaan yang ada merupakan sebuah keniscayaan yang harus dapat diterima dengan nilai yang sama sebagai satu kesatuan.

*a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, systems of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practices.*²²

Dengan demikian, multikulturalisme merupakan sebuah respons yang sama terhadap semua golongan, dan semua budaya yang ada. Karenanya, konsep multikulturalisme dalam pandangan Taylor menuntut pengakuan (*politics of recognition*) atas semua perbedaan yang harus diperlakukan sama, dihargai, dilindungi, dan dijamin pertumbuhan dan perkembangannya. Gagasan Taylor tentang *politics of recognition* awalnya merupakan gagasan politik yang kemudian berkembang dalam kajian filsafat, sosiologi, antropologi, budaya dan sebagainya. Taylor mengemukakan bahwa gagasannya tersebut bersumber pada tiga hal, yaitu 1) bahwa sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama, 2) perbedaan budaya dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan sehingga dibutuhkan hal yang ke- 3) pengakuan atas segala bentuk perbedaan tersebut.²³

Secara etimologis, istilah multikulturalisme sudah terdengar pada tahun 1950-an di Kanada, namun sebagai sebuah gerakan baru, sekitar tahun 1970-an multikulturalisme muncul di Kanada dan Australia. Kemudian multikulturalisme berkembang pesat di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lainnya. Perkembangan multikulturalisme yang sangat pesat terjadi di Amerika yang kebudayaannya didominasi oleh imigran putih dengan budaya WASP (*White, Anglo Saxon, Protestan*). Kebudayaan kaum kulit putih (*white*) yang berbahasa Inggris (*Anglo Saxon*) dan beragama Protestan mendominasi dan menguasai mainstream kebudayaan di Amerika Serikat. Di sinilah diversitas yang mengarah pada segregasi dan diskriminasi ras, suku, agama, budaya, dan gaya hidup terjadi. Hal itu kemudian mulai berubah diawali dengan konsep pendidikan yang disebut pendidikan interkultural dan interkelompok (*intercultural and inter-group education*). Pada hakikatnya, *inter-cultural education* tersebut merupakan upaya *cross cultural education*, yaitu mencari nilai-nilai universal yang dapat diterima kelompok masyarakat. Akhirnya, gerakan multikulturalisme tumbuh dan berkembang di Amerika.

Parekh²⁴ membedakan lima macam multikulturalisme, walaupun ia juga menyadari bahwa masing-masing definisi tersebut dapat saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. *Pertama*, multikulturalisme isolasionis, yang mengacu pada kehidupan masyarakat yang hidup dalam kelompok-



kelompok kultural secara otonom. Keragaman diterima, namun masing-masing kelompok berusaha mempertahankan identitas dan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat umum lainnya.

Kedua, multikulturalisme akomodatif yaitu sebuah masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, namun yang dominan juga memberikan ruang bagi kebutuhan kultur yang minoritas. Antara yang dominan dan minoritas saling hidup berdampingan, tidak saling menentang dan tidak saling menyerang. Jembatan akomodasi tersebut biasanya dengan merumuskan dan menerapkan hukum, undang-undang atau peraturan lainnya.

Ketiga, multikulturalisme otonomis. Dalam masyarakat ini, setiap kelompok masyarakat kultural berusaha mewujudkan *equality* (kesetaraan) dengan budaya yang dominan serta berusaha mencapai kehidupan otonom dalam kerangka politik yang dapat diterima secara kolektif. Tujuan akhir dari kelompok ini adalah setiap kelompok dapat tumbuh eksis sebagai mitra sejajar.

Keempat, multikulturalisme kritis atau interaktif. Dalam masyarakat ini mengutamakan upaya tercapainya kultur kolektif yang dapat menegaskan dan mencerminkan perspektif distingtif mereka. Dalam pelaksanaannya, biasanya terjadi pertentangan antara kelompok dominan dengan kelompok minoritas.

Kelima, multikulturalisme kosmopolitan. Dalam masyarakat ini akan berusaha menghilangkan sama sekali batas-batas kultural sehingga setiap anggota secara individu maupun kelompok tidak lagi terikat oleh budaya tertentu. Kebebasan menjadi jargon utama dalam keterlibatan dan eksperimen pengetahuan interkultural serta mengembangkan kehidupan kulturalnya masing-masing secara bebas.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, sesungguhnya telah mengenal konsep multikulturalisme melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika diadopsi dari pemikiran Mpu Tantular dalam kitab *Sutasoma*. Walaupun Mpu Tantular melalui kitab *Sutasoma* tersebut mencoba menangkap substansi perbedaan paham Siwaisme dan Buddhisme, namun rumusan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki makna keberagaman yang universal, bukan lagi terbatas pada Siwaisme dan Buddhisme, bahkan telah menembus batas zaman, bahkan geografisnya. Kebhinekaan atau pluralitas yang ingin disampaikan Mpu Tantular terbatas hanya sebagai kenyataan fisik-biotik. Konsepnya agar dapat memahami yang tunggal (*unity*) dengan indah, maka lapis fisik-biotik tersebut harus ditembus sehingga akan ditemukan realitas substansial yang sama dan indah. Dengan demikian, kebhinekaan tidak semestinya dijauhi, namun harus diakui sebagai sebuah keniscayaan secara kreatif sehingga melahirkan kehidupan yang saling mengisi menjadi paduan dengan komposisi yang indah. Kondisi ini akan melahirkan kemauan warga masyarakat untuk membangun suatu kultur yang baru, walau berbeda dengan kultur kelompoknya, yang kemudian menjadi pedoman dan kaidah dalam interaksi sosial bersama. Kultur baru, atau nilai-nilai dan norma-norma umum yang disepakati menjadi kaidah masyarakat tidak hanya sekadar retorika, namun benar-benar dihayati dan dijadikan sebagai milik sendiri.²⁵

Pendidikan dalam Bingkai Multikulturalisme: Sebuah Peluang atau Angan-angan



Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan corak dan karakter seseorang. Melalui pendidikan, kualitas suatu masa depan peradaban manusia dipertaruhkan. Banyak slogan yang dialamatkan pada pendidikan dan lembaga-lembaganya, mulai dari *agen social of change*, agen perubahan, pendobrak kebekuan, dan sebagainya. Berbagai macam pemahaman (doktrin) dapat dengan mudah dilahirkan melalui pendidikan. Dilihat dari perannya, maka (lembaga) pendidikan dalam masyarakat Indonesia selain sebagai agen transformasi ilmu, juga sebagai sosialisasi dan enkulturasi yang sangat dominan dalam mentransmisikan terutama budaya-budaya masyarakat yang amat plural. Sayangnya, sejak kelahiran bangsa ini, terlebih pada masa Orde Baru, dunia pendidikan serasa berada dalam kungkungan kepentingan kekuasaan. Monokulturalisme yang terjadi dalam sistem pendidikan Indonesia dilaksanakan atas dasar kebijakan sosio-politik pemerintah/penguasa, di mana sentralistik dan *uniformistik* yang dipilih telah membentuk kluster-kluster komunitas sosial yang eksklusif yang “sedikit” berjauhan dalam komunikasi dan interaksi sosial.

Sebagai contoh, lahirnya *image* sekolah favorit dan non favorit, atau sekolah negeri dan swasta membentuk karakteristik dan kelompok-kelompok tertentu dalam dunia pendidikan yang cenderung menjauh dari konsep multikulturalisme. Pembentukan kelompok tersebut jelas diikuti oleh faktor (atau kalau boleh disebut tingkatan) sosial dalam kehidupan masyarakat kita. Anak yang pintar tidak cukup untuk dapat memasuki sekolah favorit yang memiliki fasilitas bagus, namun juga harus diikuti oleh faktor “kekuatan” ekonomi orangtua. Jika ekonomi orangtua kuat, maka untuk dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah favorit menjadi mudah. Walhasil sekolah favorit menjadi sangat “istimewa” karena menjadi sekolah anak orang “degongan”. Demikian juga dengan maraknya sekolah berbasis keagamaan dan etnis, yang secara jelas menunjukkan suku, ras, dan agama. Sekolah umum, negeri, atau swasta yang berbasis Islam menjadi identik bagi sekolahnya kaum pribumi. Sementara itu, sekolah berbasis Kristen menjadi identik dengan sekolah bagi anak-anak keturunan China. Hal itu juga terjadi pada anak-anak keturunan Arab yang sekolah pada yayasan yang dimiliki warga Arab, dan seterusnya. Kondisi dan realitas ini melahirkan segregasi yang membentuk sikap eksklusifisme, dan dapat melahirkan sikap anti toleran akan kemajemukan.

Selama ini, sistem dan kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia juga tidak berjalan dalam landasan yang kuat. Ini terlihat dengan “terlalu” sering berubahnya sistem dan kurikulum yang dipakai di Indonesia. Sebagaimana dialami penulis, mulai dari kurikulum 1994, metode CBSA, hingga saat ini kurikulum berbasis kompetensi (dan kawasan). Boleh dibilang setiap ganti Menteri, maka ganti pula sistem dan kurikulum yang diterapkan. Istilah kelas VII, hingga kelas XII yang dulu tidak ada (bahkan mungkin tidak terpikirkan) sekarang mulai digunakan. Pencarian formula, metode dan strategi pendidikan yang kerap berubah tersebut sayangnya belum mampu menjadi formula “bombastis” dalam mengubah (memperbaiki) mutu pendidikan di Indonesia yang “terkenal” amat rendah. Sistem pendidikan sentralistik yang “monokultural” menjadikan semakin terkonstruks dalam tatanan pendidikan yang berlandaskan atas dasar “penguasa”.



Di tengah pluralitas yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia upaya mengungkap konsep pendidikan multikulturalisme menjadi sebuah harapan dalam membangun masyarakat multikulturalisme. Konsep sederhana tentang pendidikan multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah pendidikan dan pengakuan akan keragaman kebudayaan dan etnik masyarakat suatu bangsa.

Religious, linguistic, and national minorities, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people... had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system.²⁶

Sementara itu, James Bank menjelaskan bahwa pendidikan multikulturalisme memiliki lima dimensi yang saling berkaitan:²⁷

- a. *Content integration*, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok yang ada untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan berbagai teori dalam disiplin ilmu pengetahuan.
- b. *The knowledge construction process*, yaitu mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar memahami nilai dan implikasi budaya dalam disiplin ilmu pengetahuan (mata pelajaran).
- c. *An equality pedagogy*, yaitu penyesuaian atas metode dan cara belajar mengajar yang mampu memfasilitasi keberhasilan akademik dari peserta didik yang plural.
- d. *Prejudice reduction* adalah upaya mendata dan mengidentifikasi karakteristik peserta didik atas dasar ras, suku, golongan, dan agama sehingga dapat ditentukan metode pengajaran yang tepat.
- e. Melatih dan mengaplikasikan konsep multikulturalisme dalam setiap kegiatan belajar mengajar, termasuk budaya akademik diciptakan dari hubungan interaksi seluruh civitas sekolah yang beragam sehingga tercipta budaya akademik multikultural yang harmonis.

Bila kita lihat di Indonesia, maka konsep pendidikan multikulturalisme merupakan hal yang dapat dikatakan baru dalam perbincangan dunia pengetahuan. Pendidikan multikulturalisme relatif baru dikenal sebagai sebuah pendekatan dalam masyarakat Indonesia yang sangat plural. Alhasil, menyusun pendidikan multikulturalisme Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Pendidikan multikulturalisme harus mampu menjembatani proses belajar untuk mengubah perspektif monokultural menuju perspektif multikultural yang jauh dari prasangka, diskriminatif, penuh toleran, dan sikap terbuka. Untuk itu, pendidikan multikultural harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif sehingga tidak kehilangan semangat dan jiwanya. Paradigmanya ditekankan pada kompetensi kebudayaan sehingga tidak berkutat pada aspek kognitif saja, namun juga melangkah pada aspek psikomotorik.²⁸ Ada beberapa pendekatan dalam mewujudkan pendidikan multikulturalisme, yaitu:²⁹

Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*). Di sini, tanggung jawab mutu dan kualitas pendidikan bukan hanya milik guru dan sekolah saja, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.



Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan-kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Oleh karena itu, hal itu tidak lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok etnik seperti yang terjadi selama ini.

Ketiga, pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru, maka dibutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang memiliki kompetensi.

Keempat, pendidikan multikultural harus mampu meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan, yang kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwibudaya.

Untuk dapat mewujudkan pendidikan multikulturalisme, maka dukungan semua pihak dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan.

Keluarga memegang peranan penting dalam ikut menyukseskan implementasi konsep pendidikan multikulturalisme tersebut karena nilai multikulturalisme dapat mulai ditanamkan sejak dari lingkungan keluarga. Keteladanan dan konsistensi orangtua dalam membumikan ide-ide multikulturalisme tersebut sangat penting di sini.

Sementara itu, dalam pandangan Tilaar, untuk dapat membangun pendidikan multikultural di Indonesia harus diperhatikan enam hal:³⁰

Pertama, pendidikan multikultural haruslah berdimensi “*right to culture*” dan identitas lokal sehingga kelangsungan budaya lokal terjamin

Kedua, kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanschauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Di sini, pengoptimalan kebebasan dan penjaminan hak-hak kebudayaan lokal dapat diapresiasi sejajar atau beriringan dengan kebudayaan nasional.

Ketiga, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada.

Keempat, pendidikan multikultural adalah suatu rekonstruksi sosial dalam kehidupan masyarakat sehingga pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada *xenophobia*, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama.

Kelima, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*).

Keenam, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang plural.

Setidaknya pemikiran-pemikiran di atas menggambarkan betapa diidam-idamkannya konstruksi masyarakat plural (seperti Indonesia) dalam bangunan yang saling menghormati, menghargai, serta dapat hidup dalam tatanan masyarakat walaupun masing-masing memiliki identitas budaya. Sebuah peluang bagi kehidupan plural yang harmonis, akankah dapat terwujud atau hanya sekadar angan-angan?

“Hai sekalian manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sekalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling



mengenal dan menghargai. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu.” (Surat al-Hujurat/49: 13).

Endnote

- ¹ Ki Supriyoko, “Pendidikan Masyarakat Multikultural,” dalam *Kompas*, 26 Januari 2004, hal. 4.
- ² Konflik sosial dan kekerasan dalam masyarakat semakin menjadi terutama pasca berakhimya Orde Baru (1998). Beberapa tulisan yang membahas hal ini: I.J. Piliang, “Menjemput Tahun (Depan) Kekerasan” dalam *Kompas*, 29 Januari 2003, hal. 4; J. Lalahima, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001); juga tulisan dalam *Kompas*, “Ambon Manise, Ambon Menangis” dalam *Kompas*, 1 Mei 2004.
- ³ Sutanto, L., “Menumbuhkembangkan Budaya Perdamaian, Budaya Membantu, Budaya Nirkekerasan,” dalam Makalah pada Konvensi Nasional Kesehatan Jiwa II di Jakarta, 2003.
- ⁴ Yayah Kisbiyah, “Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme”, dalam *Quo Vadis Pendidikan di Indonesia? Refleksi di Penghujung Abad ke-20* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2000), hal. 70.
- ⁵ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, cetakan II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 63-64.
- ⁶ Parsudi Suparlan, “Masyarakat Majemuk dan Perawatannya,” dalam *Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I*, Makasar 2000, hal. 44.
- ⁷ Pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan tahun 2000.
- ⁸ Gerstein, L.H., & Moeschberger, S.L., “Building Cultures of Peace: An Urgent Task for Counseling Professionals,” *Journal of Counseling & Development*, 81 (1), hal. 115-119.
- ⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hal. 1.
- ¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, *Kamus besar bahasa Indonesia Edisi ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 232.
- ¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Teoritis: Apakah Pendidikan Masih Diperlukan?* (Bandung: CV Mandar Maju, 1992), hal. 2.
- ¹² Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), hal. 3, bandingkan dengan pendapat Achmad Sudja'ie dalam dalam Ruswan Thoyyib dan Darmuin (Peny.), *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hal. 36, yang menjelaskan bahwa pengertian pendidikan hanya dapat ditinjau dari dua segi yaitu sudut pandang masyarakat dan individu.
- ¹³ *Ibid*, hal. 3.
- ¹⁴ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21* (Jakarta: Al-Husna, 1988) hal. 57.
- ¹⁵ *Op. cit.* hal. 3.
- ¹⁶ *Ibid*, hal. 4.
- ¹⁷ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam*, hal. 57.
- ¹⁸ M. Syafii Anwar, “Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Membingkai Potret Pemikiran Politik KH. Abdurrahman Wahid”, pengantar dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* cetakan II (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. xxvii.
- ¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* cetakan II (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 245-246.
- ²⁰ JS. Fumivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (New York: MacMillan, 1944), hal. 446.
- ²¹ Scott Lash dan Mike Featherstone (Ed.), *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), hal. 2-6.
- ²² Bikhu Parekh, “National Culture and Multiculturalism”, dalam Kenneth Thomson (Ed.), *Media and Cultural Regulation* (London: Sage Publications, 1997), hal. 167.
- ²³ Charles Taylor, “The Politics of Recognition”, dalam Amy Gutman, *Multiculturalism Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994), hal. 18.



²⁴ Bikhu Parekh, "National Culture and Multiculturalism", dalam Kenneth Thomson (Ed.), *Media and Cultural Regulation* (London: Sage Publications, 1997), hal. 183-185.

²⁵ *Ibid.*, hal. 304.

²⁶ Rudolfo Stavenhagen, "Educational for a Multicultural World", dalam Jasque Delors (et al). *Learning: The Treasure Within* (Paris: UNESCO, 1996).

²⁷ James A. Bank. dan Cherry A. McGee (Ed.), *Handbook of Research on Multicultural Education* (San Francisco: Jossey-Bass, 2001).

²⁸ Paulus Mujiran, "Masa Depan Pendidikan Multikulturalisme," dalam *Suara Merdeka*, tanggal 8 Januari 2007.

²⁹ Muhaimen e-Ma'hady, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikulturalisme," dalam <http://www.Pendidikan Network>, diakses 17 Agustus 2009. lihat juga Paulus Mujiran.

³⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 185-190.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bank, James A. dan Cherry A. McGee (Ed.). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey-Bass.

El-Ma'hady, Muhaimen. 2009. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikulturalisme," dalam <http://www.Pendidikan Network>, diakses 17 Agustus 2009.

Furnivall, JS. 1944. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. New York: MacMillan.

Gerstein, L.H., & Moeschberger, S.L., "Building Cultures of Peace: An Urgent Task for Counseling Professionals", dalam *Journal of Counseling & Development*.

J. Luluhima, 2001. *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundumya Presiden Soeharto*. Jakarta: Penerbit Kompas.

Kartono, Kartini, 1992. *Pengantar Mendidik Teoritis: Apakah Pendidikan Masih Diperlukan?* Bandung: CV Mandar Maju.

Ki Supriyoko, 2004. "Pendidikan Masyarakat Multikultural," dalam *Kompas*, 26 Januari 2004 .

Kompas. 2004. "Ambon Manise, Ambon Menangis," dalam *Kompas*, 1 Mei 2004.

Langgung, Hasan. 1988. *Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke-21*. Jakarta: Al-Husna.

. 1993. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Lash, Scott dan Mike Featherstone (Ed.). 2002. *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture*. London: Sage Publication.

Mujiran, Paulus. 2007. "Masa Depan Pendidikan Multikulturalisme" dalam *Suara Merdeka*, tanggal 8 Januari 2007.

Parekh, Bikhu, 1997. "National Culture and Multiculturalism", dalam Kenneth Thomson (Ed.), *Media and Cultural Regulation*. London: Sage Publications.

Piliang, I.J. 2003. , "Menjemput Tahun (Depan) Kekerasan" dalam *Kompas*, 29 Januari 2003.

Ramayulis. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Sudja'ie, Achmad dalam Ruswan Thoyyib dan Darmuin (Peny.). 1999. *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Suparlan, Parsudi. 2000. "Masyarakat Majemuk dan Perawatannya," dalam Prosiding Simposium Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia I*, Makasar 2000.
- Sutanto, L., 2003. "Menumbuhkembangkan Budaya Perdamaian, Budaya Membantu, Budaya Nirkekerasan", dalam Makalah pada Konvensi Nasional Kesehatan Jiwa II di Jakarta, 2003.
- Stavenhagen, Rudolfo. 1996. "Educational for a Multicultural World," dalam Jasque Delors *et al. Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Taylor, Charles, 1994. "The Politics of Recognition", dalam Amy Gutman. *Multiculturalism Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-2*. 1994. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahid, Abdurrahman. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Yayah, Kisbiyah. 2000. "Mencari Pendidikan yang Menghargai Pluralisme", dalam *Quo Vadis Pendidikan di Indonesia? Refleksi di Penghujung Abad ke-20*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.